

Media Online	Radartegal.disway.id
Tanggal	28 Juli 2023
Wilayah	Kota Pekalongan



Kenaikan Anggaran Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024 Minim, Begini Respon Ketua DPRD

<https://radartegal.disway.id/read/660152/kenaikan-anggaran-belanja-kota-pekalongan-tahun-2024-minim-begini-respon-ketua-dprd>

RADAR TEGAL - Kenaikan anggaran belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2024 minim.

Dari paparan KUAPPAS Kota Pekalongan Tahun 2024 yang disampaikan Walikota Pekalongan A Afzan Arslan Djunaid. Diketahui belanja daerah Pemkot Pekalongan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.008.539.215.000.

Jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada Penetapan APBD Kota Pekalongan TA 2023, angka kenaikan belanja daerah 2024 minim, hanya naik 0,01 persen.

Karena biasanya, kenaikan anggaran belanja dari tahun ke tahun mencapai 3 sampai 10 persen.

Menikapi minimnya kenaikan anggaran belanja daerah 2024, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengatakan, Pemkot Pekalongan perlu melakukan langkah yang tepat. Yakni merumuskan fokus pembangunan di tahun 2024.

Menurut Azmi, mengingat keterbatasan anggaran, lebih baik pelaksanaan pembangunan tidak terpecah ke berbagai bidang.

"Harus ditentukan dulu, tahun 2024 fokus pembangunannya ke mana. Karena di Kota Pekalongan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Apakah penataan Alun-alun, atau pembangunan proyek pengendalian banjir dan rob itu perlu anggaran untuk maintenance ke depannya. Atau permasalahan sampah. Pemerintah harus menentukan fokus pembangunan yang menjadi prioritas," ujarnya.

Jika sudah ditentukan fokusnya, sambung Azmi, DPRD akan melakukan pembahasan bersama OPD terkait program-program apa saja yang akan dijalankan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dengan begitu, menurut dia penganggaran akan lebih efektif.

Ihwal minimnya kenaikan anggaran belanja daerah, DPRD juga akan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

"Khususnya pada bidang-bidang yang masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan anggaran belanja daerah," ujarnya sebagaimana dilansir radarpekalongan.id.

Azmi mencontohkan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya, itu masih bisa dioptimalkan.

Selain itu, juga PAD dari Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana yang saat ini cenderung menurun.

"Kemarin sering disampaikan dari Komisi C terkait TWL Pasir Kencana karena pendapatannya saat ini cenderung menurun. Ini harus dibahas bersama apa yang menjadi kendala dan bagaimana mengoptimalkannya. Dari Komisi C sudah menyampaikan bahwa event-event kalau bisa ditarik ke sana sehingga bisa menaikkan pendapatan," kata Azmi lagi.

Dengan optimalisasi potensi pendapatan, maka anggaran belanja akan lebih besar sehingga pelaksanaan program pembangunan bisa lebih leluasa.